



JURNAL POLITEA

ISSN : 2621-0312

Vol. I No. I, 2018

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

KAJIAN KEPERIBADIAN PRESIDEN PERANCIS EMMANUEL MACRON MENGGUNAKAN LEVEL ANALISIS INDIVIDU

Renny Candradewi Puspitarini, Sofiatul Afkarin

Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia, Universitas Panca Marga, Probolinggo, Indonesia,
Renny.candradewi@upm.ac.id, afkarinsofi77@gmail.com

ABSTRACT

Individual Level Analysis of France President Emmanuel Macron. This paper is the result of an individual level analysis study conducted to explain qualitatively the personality, motivation and beliefs of French President Emmanuel Macron. This study employs qualitative data consisting of event data collected from various news sources with exclusion of exclusive interviews and state speeches and studied since Emmanuel Macron was inaugurated as President of France on May 17, 2017. Explanations regarding personality, motivation and beliefs assist to compile the rationality built on the record of educational background, family background, personality also helps to identify the relationship between leadership styles, motivation for decisions and actions that reflect the direction of French foreign policy. While beliefs are recognized through statements and answers given by for questions raised by journalists or foreign journalists in certain situations. This paper using a framework of individual analysis studies by Valerie Hudson, Jerrold Post and Margaret Hermann, it is concluded that Emmanuelle Macron is classified as a type of leader who is inconsistent with the characteristics of expansionist ambitions, high information complexity, good level of diplomatic knowledge or training and always had a consideration to invite other countries to establish harmonious and strategic relations with France.

Keywords: individual level analysis, leadership type, conciliatory leadership type, foreign policy analysis.

Pendahuluan

Ketika pakar politik internasional dan hubungan internasional dimintai penjelasan sehubungan dengan putusan seorang pemimpin, sangat penting untuk mengawali dengan asumsi bahwa pemimpin yang membuat keputusan membingungkan pada hakikatnya

adalah manusia rasional yang mencoba yang terbaik yang ia miliki untuk mengambil putusan kebijakan luar negeri yang terlihat baik untuk negaranya (Tetlock, 2017). Setelah asumsi dibuat, maka kita diajak untuk menelusuri motivasi yang pemimpin miliki sehingga situasi yang dihadapi pemimpin dan faktor-faktor yang mendorong keputusan seorang pemimpin menjadi “keputusan yang buruk” dapat dipahami.

Penelitian Margaret D Hermann (Hermann, 1980; Hermann & Milburn, 1977) mengelompokkan tipe pemimpin menjadi dua kriteria yakni tipe ekspansionisme dan tipe konsolisiatoris. Pemimpin dengan ekspansionisme mengedepankan pada kepercayaan diri dapat mengontrol situasi. Pemimpin dengan konsolisiatoris mengedepankan hubungan erat dan harmonis dengan negara-negara lain.

Sedangkan Valerie Hudson (2013) mengelompokkan tipe pemimpin menjadi enam kriteria yang lebih spesifik menggabungkan konseptualisasi dari Jerrold Post (Post, 2010) dan Hermann (1980). Ekspansionisme terdiri atas ekspansionis itu sendiri, evangelis, inkremental, dan karismatik.

Ekspansionis meliputi perilaku yakni menantang batasan yang ada, informasi bersifat tertutup, dan fokus pada masalah: fokus pada meluaskan kekuasaan dan pengaruh. Evangelis meliputi perilaku pemimpin yang menantang batasan-batasan, informasi bersifat tertutup, fokus pada hubungan: fokus untuk mengajak orang lain untuk menerima pesannya dan bergabung dalam suatu tindakan bersama. Inkremental mengandung arti perilaku yang menantang batasan-batasan yang ada, terbuka akan informasi, fokus pada persoalan: fokus dalam menjaga manuver dan fleksibilitas di saat yang sama menghindari rintangan yang dapat membatasi keduanya. Karismatik mengandung arti perilaku yang menantang batasan-batasan, terbuka akan informasi, fokus pada hubungan: fokus akan mencapai suatu agenda dengan melibatkan lainnya dalam proses dan mengajak mereka untuk bertindak bersama (Hudson, 2013).

Konsolisiatoris terdiri atas perilaku yang bersifat direktif, konsultatif, reaktif dan akomodatif. Dari sini kita dapat mengenali, pribadi pemimpin yang direktif yang dicirikan dengan menghargai adanya perbedaan, tertutup akan informasi, fokus pada persoalan yang mana secara personal mengarahkan kebijakan bersamaan dengan langkah-langkah yang konsisten dengan pandangan sendiri juga bekerja dengan norma dan aturan posisi saat ini. Pemimpin yang reaktif menghargai batasan, terbuka akan informasi. Fokus persoalan terletak pada situasi alamiah persoalan itu sendiri dan mempertimbangkan apa yang konstituen anggap penting. Pemimpin yang akomodatif artinya pemimpin yang menghargai batasan-batasan yang ada, terbuka akan informasi, fokus pada hubungan, berbagi tanggung jawab dalam prosesnya (Hudson, 2013, hlm. 60).

Konseptualisasi dari pemimpin berdasarkan penelitian Jerrold Post (2003) dan Margaret Hermann (2013) bermanfaat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi presiden. Selain itu, faktor-faktor tadi dapat digunakan untuk menentukan indikator dan subindikator. Sub indikator bermanfaat untuk mempermudah merumuskan pertanyaan jika menggunakan teknik analisis isi.

Untuk mengkaji kebijakan luar negeri dengan menggunakan level analisis individu, diperlukan sejumlah teknik yang bersifat khas. Sebagian besar kajian kebijakan luar negeri masih menggunakan arus utama yang mana menggunakan level analisis individu yang

diukur dari level negara atau atribut sistem (Hudson, 2013). Metodologi ini lazim dipakai pada masa perang dingin. Setelah perang dingin, para pakar mengenali bahwa krisis yang terjadi di Irak dan Korea Utara cenderung untuk sekali lagi melihat kembali individu sebagai variabel penting yang layak diteliti guna dapat memahami kebijakan luar negeri dari negara-negara tersebut. Namun metodologi ini agaknya mulai ditinggalkan mengingat metodologi lain misalnya analisis level individu lebih dapat melingkupi jawaban yang ada.

Hudson merinci sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam mengkaji peran individu dalam politik luar negeri. Pertama adalah, tipe pemerintahan yang seperti apa yang dapat memainkan peran penting dalam menjawab kapan seorang individu menjadi sangat penting dalam politik luar negeri. Setiap rezim negara memiliki batasan masing-masing akan kontrol pemimpinya dalam suatu kebijakan.

Kedua, sangat penting untuk mengetahui apakah seorang pemimpin cukup tertarik terjun dalam politik luar negeri. Semakin seorang pemimpin tidak tertarik untuk terjun dalam politik luar negeri, semakin besar ia akan mendelegasikan kekuasaan dan pengambilan keputusan pada siapa ia anggap cukup berwenang.

Hal ketiga yang dapat menjawab kapan pemimpin menjadi penting dalam urusan luar negeri adalah ketika terjadi krisis. Situasi krisis biasanya akan diatasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Apalagi jika hal yang dipertaruhkan semakin besar misalnya kedaulatan negara sedang dipertaruhkan.

Hal keempat adalah karakter pemimpin akan menguat dalam politik luar negeri pada situasi yang penuh ketidakpastian. Ketika dewan pertimbangan tidak dapat mengambil keputusan bulat akan suatu hal yang sifatnya sangat penting. Maka presiden akan diminta untuk memberi masukan dan mengambil putusan akhir. Hal ini diperlukan jika terdapat perencanaan jangka panjang yang mana terdapat doktrin strategis atau pendekatan terhadap persoalan tertentu dari suatu hal yang belum terjadi atau belum dapat diprediksi.

Margaret Herman meletakkan variabel kelima yakni tingkat apakah pemimpin sebelumnya telah mendapat latihan diplomat. Herman berpendapat, pemimpin dengan sejarah latihan diplomat meminta bawahannya untuk mempelajari karakter personal dari persyaratan diplomatik yang dibutuhkan pada situasi tertentu. Pemimpin yang tidak memiliki latihan seperti ini sering kali menunjukkan sikap kurang peka. Maka tidak heran, Margaret Hermann kemudian menyebutnya dengan “tidak sensitive” (*insensitive*).

Keahlian di bidang tertentu juga turut menentukan besar tidaknya peran pemimpin. Pertanyaan yang muncul untuk dapat mengukur keahlian di bidang politik luar negeri dapat diketahui dengan apakah pemimpin cukup ahli di banyak bidang dan mengetahui banyak hal yakni informasi yang diperlukan sehingga dapat mengambil keputusan yang paling sesuai di situasi yang paling sulit.

Metode

Terdapat dua konsep utama yang dapat dijadikan patokan untuk mulai menyusun penjelasan tentang asumsi serta motivasi pemimpin tersebut. Pertama, ialah memahami adanya suatu rasionalitas dan keputusan kebijakan luar negeri yang baik. Asumsi dasar dari rasionalitas adalah mencoba memahami bahwa pada kenyataannya pemimpin bukanlah orang yang bodoh untuk dapat membuat suatu keputusan yang berakhir sebagai suatu

kecerobohan. Bahwa mereka sebagai pemimpin dari suatu negara pada hakikatnya telah mengetahui yang terbaik dari kemungkinan terburuk sekalipun yang pernah ada.

Konsep yang digunakan dan diteliti dalam analisis kebijakan luar negeri yakni *decision* atau putusan yang diambil oleh pengambil keputusan manusia dengan merujuk pada konsekuensi dari entitas eksternal maupun tanpa rujukan sama sekali. Putusan yang demikian dapat meliputi bentuk tanpa aksi maupun tanpa putusan sama sekali. Artinya, putusan atau kebijakan luar negeri dapat berupa aksi atau tanpa aksi. Juga dapat berupa suatu putusan maupun tanpa putusan.

Pakar hubungan internasional dapat meneliti suatu konstelasi putusan yang diambil dengan merujuk pada suatu situasi. Tidak hanya itu, putusan juga dapat berubah sepanjang waktu, dibingkai, dan persepsi ke tahap lebih lanjut dari suatu keinginan untuk memprioritaskan tujuan, perencanaan mendatang, dan penilaian atas pilihan-pilihan yang ada. Terakhir, analisis politik luar negeri secara konvensional tertarik untuk menganalisis putusan yang diambil oleh manusia yang memiliki posisi dan wewenang untuk melaksanakan kebijakan luar negeri negara, meskipun sangat mungkin juga menganalisis putusan pada pelaku yang tidak memegang putusan tersebut juga.

Sedang hal yang tidak diteliti dan tidak dijelaskan dalam analisis kebijakan luar negeri adalah kecelakaan atau kesalahan atau putusan lain yang tidak dapat dikonseptualisasi sebagai memiliki komponen internasional. Dengan kata lain, disebut suatu tindakan yang tidak memiliki tujuan. Misalnya, suatu tindakan atau putusan yang tidak dapat dianalisis dengan kajian kebijakan luar negeri, namun sangat mungkin dapat dianalisis menggunakan analisis kebijakan publik. Akan tetapi, konseptualisasi dan metodologi yang digunakan dalam analisis kebijakan luar negeri barangkali dapat digunakan untuk meneliti dan menjelaskan putusan kebijakan publik. Oleh karena itu dengan mempelajari analisis kebijakan luar negeri, dapat juga membantu untuk menganalisis pelaku pengambilan kebijakan daripada hanya meneliti pada substansinya.

James Rosenau mengajak untuk membangun teori *cross-national* dan teori *multilevel* yang dapat menjadi salah satu uji yang menyusun dasar kajian perbandingan politik luar negeri (PPLN). Kebijakan luar negeri menurutnya tidak dapat dikaji secara utuh sebaik ilmu perilaku kebijakan luar negeri. Dalam kajian perilaku kebijakan luar negeri terdapat variabel event yang terdiri dari unsur “siapa mempengaruhi apa, dan bagaimana” atau *who does what to whom, how*.

Berpedoman pada konseptualisasi di atas membantu peneliti perbandingan politik luar negeri dan analisis kebijakan luar negeri melakukan reduksi data. Sehingga data yang tidak mengandung unsur siapa melakukan apa pada siapa dan bagaimana, perlu dikesampingkan dari metodologi penelitian. Tidak hanya itu, ada tidaknya dampak kebijakan terhadap perkembangan situasi politik internasional juga menjadi faktor keempat yang patut diikutsertakan. Sejumlah faktor dan pola menjadi variabel independen yang dapat diikutsertakan dalam usaha mendapat penjelasan dan menyusun rasionalitas.

Kajian Teori

Terdapat sejumlah teori yang relevan dalam hubungan internasional yang dapat digunakan dan diterapkan untuk mempelajari kebijakan luar negeri. Salah satu teori yang

menjadi pondasi dasar penjelasan ialah teori “two level game” milik Robert D Putnam (1988). Teori ini menyatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan gabungan aturan main dari politik domestik dan politik internasional. Beberapa teori lain yang penting yang dapat diterapkan untuk mempelajari kebijakan luar negeri, namun belum dikembangkan sepenuhnya atau belum mendapat perhatian penuh, adalah teori yang mengaitkan bagaimana faktor budaya dan konstruksi sosial dalam suatu kultur mempengaruhi tingkah laku negara.

Selain peristiwa dan data peristiwa, terdapat metodologi penelitian yang dapat digunakan yakni *integrated explanations*. Artinya, variabel independen pada beberapa level analisis saling ditautkan oleh proposisi teoritis bahkan beberapa dapat berupa persamaan matematika dan statistik.

Teori lain yang bermanfaat ialah teori pembentukan negara milik Stein Rokkan (1973). Teori ini menyatakan proses kelahiran negara yang berasal dari peretakan. Peretakan ini kemudian mengawali berdirinya negara yang diikuti oleh langkah-langkah seperti, pembentukan negara, pembangunan negara, demokrasi massa dan negara sejahtera. Teori lain yang bermanfaat untuk melihat fungsi negara ialah Teori Negara yang memetakan paradigma yang berlaku dalam melihat kehadiran negara. Teori ini merupakan rangkuman dari pemikiran para pakar yang dirangkum dalam paradigma struktural fungsionalisme, struktural kritis, feminisme, dan konstruktivisme. Ulasan tentang teori negara menurut Newton dan Van Deth (2016) adalah terdiri atas pendekatan konstitusi, pendekatan etika dan moral, pendekatan konflik dan pendekatan pluralis.

Teori hubungan internasional yang memetakan teori arus utama merupakan modal penting untuk dapat menaksir kerangka kebijakan luar negeri suatu negara. Teori arus utama ini terdiri dari liberalisme, neoliberalisme, marxisme, neo-marxisme, strukturalisme, neo-strukturalisme, feminisme, dan konstruktivisme. Kesemuanya dapat dipelajari dalam teori hubungan internasional dan politik internasional.

Meskipun demikian, patut diketahui bahwa perkembangan interaksi hubungan internasional ini tidak lepas dari catatan peristiwa dan data peristiwa yang mengantarkan kita pada situasi saat ini. Catatan peristiwa ini dapat kita rinci dari era imperialisme, feodalisme, kolonialisme, industrialisasi, globalisasi ekonomi, modernisasi, postmodernisme, hingga industrialisasi 4.0. Untuk dapat mengenali modernisme dan karakternya, maka buku *Konsekuensi-konsekuensi Modernitas* Anthony Giddens dapat menjadi rujukan penting.

Pembahasan

Kepribadian, Motivasi dan Keyakinan

Emmanuel Macron merupakan presiden ke-25 yang lahir dari daerah Amiens, Perancis pada 21 Desember 1977 di mana pada saat itu terjadi Perang Dingin. Macron merupakan keturunan dari Jena dan Michel Macron yang merupakan Profesor Neurologi di Universitas Picardy dan francoise Macron, Nogues. Ia menjadi dewasa di lingkungan para profesor yang membuat dia tumbuh menjadi sosok yang cemerlang. Emmanuel Macron menempuh pendidikan selama beberapa tahun di Lycee La Providence In Amiens yang didirikan oleh Yesuit sebelum dia melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi Elite Lycee Henri IV di Paris dan Paris X Nanterre (DEA dalam bidang Filsafat). Sehingga filsafat ialah bidang asli Macron sebelum akhirnya bekerja menjadi bankir.

Sebelum terjun ke dunia politik, Emmanuel Macron merupakan seorang Bankir Investor Perancis. Pada tahun 2014 dia dilantik sebagai menteri ekonomi, pembaruan industri dan urusan digital dalam pemerintahan Manuel Valls, dia menekankan pada reformasi bisnis yang ramah. Mantan Perdana Menteri Manuel Valls sempat memandang remeh dan menyebutnya sebagai “populis kelas ringan”, Namun sejumlah pengamat menuturkan, daya tarik Emmanuel Macron justru terletak di latar belakangnya yang tidak biasa di kalangan politisi, yakni bankir investasi dengan dompet berisi jutaan euro, yang berubah haluan menjadi pejabat publik. Sebagai kandidat yang belum pernah memegang jabatan lewat pemilu, Emmanuel Macron bisa menawarkan dirinya sebagai «anti-sistem» untuk warga yang muak dengan perpolitikan Perancis. Kepribadian Emmanuel Macron sangatlah unik.

Macron adalah seorang pejabat dan politikus yang terpilih menjadi seorang Presiden Perancis pada pemilihan umum tahun 2017, pada tahun 2014 nama Macron belum terkenal oleh masyarakat Perancis kemudian ia menjadi calon presiden terkuat mengalahkan Marine Le Pen dengan perolehan suara sebanyak 65,8 persen (kompas.id, 2017). Terdapat dua hal menarik dari pemilu Prancis. Pertama, Macron menjadi Presiden termuda negara Perancis dalam sejarah, dalam musianya yang masih 39 tahun. Kedua, margin keunggulan suara yang diperoleh Macron melampaui margin kemenangan Presiden Jacques Chirac dari partai konservatif yang meraih 82,2 persen suara atas ayah Marine Le Pen, pendiri Front Nasional sayap kanan, yaitu Jean-Marie Le Pen, dalam pemilihan presiden 2002 (kompas.id, 2017).

Saat melakukan kampanye ia mencetuskan beberapa hal yang akan dilakukan saat terpilih menjadi Presiden Perancis adalah berkomitmen terhadap Perancis yang terbuka, serta berjanji mengedepankan inovasi dan reformasi ekonomi. Dia juga berjanji akan melindungi kelas pekerja.

Pidato Presiden Macron juga menyatakan pendapatnya dan posisi Perancis di tengah-tengah ketidakpastian global. Ia menyatakan Perancis akan tetap Bersama dengan Uni Eropa dan mengedepankan kemitraan global yang strategis. Dia berani mengungkapkan bahwa Perancis harus tetap memegang teguh nilai-nilai Liberte, Egalite dan Fraternite yang masing-masing memiliki arti kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Emmanuel Macron menunjukkan rasa simpati dan solidaritas terhadap warga pengungsi dan imigran. dalam beragam kesempatan ia menjamin komitmen Perancis untuk tetap berdampingan dengan Uni Eropa dan menjauhi praktik yang ia sebut dapat mengancam kestabilan global (kompas.id, 2017).

Emmanuel macron juga memiliki kepercayaan diri yang besar ini dibuktikan ketika ia maju sebagai calon presiden Prancis walaupun berasal dari partai yang masih muda, tidak memutuskan semangatnya untuk menjadi seorang pemimpin. Ini merupakan sebuah hal yang sangat ekstrim, mengingat dia seorang politikus yang baru lahir dan langsung membentuk partainya sendiri yang dia berikan nama *En Marche!* Yang memiliki arti maju kedepan! Rasa percaya diri dan motto dari partainya, dia berhasil menjadi Presiden mengalahkan Marine Le Pen dari Partai Nasional. Emmanuel Macron berhasil menyingkirkan partai arus utama dan menyingkirkan partai sayap kanan yang mengusung Islam-fobia yang anti imigran dan ingin Perancis keluar dari Uni Eropa. Tentu saja ini sangat melegakan bagi warga Perancis dan bagi Uni Eropa setelah Macron yang berhasil menduduki kursi presiden yang memiliki moto sejalan dengan keinginan warganya.

Macron merupakan sosok yang memiliki simpati atas pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di dunia internasional. Ia mengecam aksi kekerasan Israel yang menewaskan puluhan demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Macron mengutuk kekerasan yang dilakukan tentara-tentara Israel yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Macron langsung menghubungi Raja Yordania Abdullah dan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui via telepon untuk membahas kejadian tersebut. Tidak hanya itu Macron berusaha menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu melalui via telepon. Dalam pernyataannya, Macron menegaskan kembali sikap pemerintahnya yang menentang pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Selain peristiwa itu, rasa simpatinya juga ditunjukkan terhadap warga imigran. Presiden Macron sangat menghormati warga-warga imigran, dia menegaskan bahwa dia mendukung sanksi finansial terhadap anggota Uni Eropa yang tidak mau menerima imigran, menurutnya anggota Uni Eropa seluruhnya mampu menerima para imigran dengan sikap yang kooperatif.

Selain memiliki rasa simpati yang tinggi, Presiden Macron juga memiliki sikap yang tegas namun lamban untuk memberikan sanksi yang setimpal karena Macron masih mempertimbangkan antara kesalahan dan sanksi yang diberikan berlaku adil atau tidak, selain itu dipengaruhi oleh sikap Presiden Emmanuel Macron yang memiliki rasa belas kasih, ini dibuktikan dengan memecat ajudannya yang terbukti memukul demonstran di jalanan Paris. Pemecatan ini dilakukan setelah kasusnya berjalan tiga bulan. Sebelumnya telah terjadi demonstrasi pada May Day yang digelar oleh serikat buruh di Perancis. Unjuk rasa ini sering berujung pada bentrokan dengan polisi.

Pada saat itu terekam oleh sebuah kamera bahwa telah terjadi pemukulan terhadap demonstran oleh seorang laki-laki yang memakai baju polisi, belakangan diketahui bahwa seseorang itu merupakan staff kepresidenan yang diberikan izin untuk menyaksikan aksi demonstrasi hanya sebagai pemantau saja. Namun tindakan staf tersebut melampaui batas sehingga hal ini menuai banyak kecaman terhadap Presiden Macron. Macron hanya memberikan cuti selama lima belas hari saja sebagai sanksinya tanpa diberi gaji. Setelah itu, dia tetap bertugas seperti sediakala. Termasuk di antaranya, membantu koordinasi pengamanan untuk penyambutan tim sepak bola Perancis yang baru memenangi Piala Dunia di Rusia (Dallison, 2018).

Menantang Batasan-Batasan

Sikap menantang Batasan dapat dikenali dengan mempelajari tingkat keberanian seorang kepala pemerintahan untuk mengambil tindakan yang tidak populer. Tindakan tidak populer yang dimaksud ialah tindakan yang bertentangan dengan norma maupun hukum internasional. Selama memerintah Perancis, Macron menunjukkan sedikit sekali menentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di Perancis. Sikap dia yang paling utama di dalam negeri ialah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi Perancis di saat negara-negara Uni Eropa terancam dengan hutang tinggi.

Presiden Macron juga menegaskan sikap Perancis yang ingin menjaga keutuhan Uni Eropa dan tidak akan mengikuti Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Namun berkaitan dengan sikap kepala pemerintahan lain yang menunjukkan sikap bertentangan dengan sikap Perancis. Presiden Perancis dapat menunjukkan sikap tegas. Hal ini tecermin pada sambutan yang diberikan Presiden Perancis saat Presiden Amerika Serikan Donald Trump melangkah masuk ruang rapat dengan terlambat (kompas.id, 2018). Kantor berita *Associated Press* memberitakan saat Trump masuk ruangan, Presiden Perancis Emmanuel Macron

langsung memelototi Trump. Macron mungkin jengkel karena keterlambatan Trump membuat jadwal pertemuan bilateral mereka pada Jumat pagi menjadi tertunda (kompas.id, 2018).

Menghargai Perbedaan dan Tingkat Kompleksitas Informasi

Saat ini Perancis sedang dilanda gelombang dua isu yang menjadi perhatian utama Presiden Macron karena menentukan arah kebijakan negara. Isu tersebut ialah kebijakan imigrasi dan kebijakan anti-ras. Presiden Macron dalam pidato inaugurasinya menegaskan bahwa kebijakan imigrasi Perancis berjalan selaras dengan kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa sendiri dengan tegas tidak menolak gelombang imigran yang berasal dari negara-negara berkonflik. Presiden Macron juga menolak bersikap anti-rasis. Pernyataan ini juga menjadi inti arah kebijakan yang akan diperjuangkan selama masa pemerintahannya. Hal ini berbeda dengan kampanye yang dilakukan oleh pesaingnya pada pemilu 2017 yang bersikap anti-Uni Eropa, anti-imigran, serta cenderung rasis seperti sebagian besar gelombang populisme yang melanda negara-negara maju di Amerika dan Uni Eropa.

Tidak banyak ditemukan bahwa Presiden Macron menantang komitmen terhadap kestabilan global. Contoh paling baik dari tindakan menantang batasan-batasan ini adalah tindakan sepihak yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump.

Baru-baru ini, Presiden Macron mendapat komentar kurang menyenangkan dari Presiden Trump. Presiden Trump menilai Presiden Macron sebagai individu yang mengabaikan nasionalisme. Presiden Trump juga mengomentari capaian kepuasan warga Perancis akan 16 bulan pemerintahan Presiden Macron di Perancis yang mencapai penurunan signifikan (“Macron’s approval ratings slip again in latest opinion poll – POLITICO,” 2018). Merespon pernyataan Presiden Trump, Presiden Macron menyampaikan pada media bahwa ia yakin rakyat Perancis tidak mengharapkan agar ia merespon cuitan Presiden Trump (“Macron brushes off Trump attacks: US alliance deserves ‘respect’ | France News | Al Jazeera,” 2018). Macron juga menambahkan dalam wawancara dengan media bahwa Amerika Serikat merupakan sekutu dan akan terus demikian. Sekutu yang mana resiko akan selalu diperhitungkan, yang dapat dijalankan meski sulit. Hal ini menyimpulkan meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit demikian, Presiden Macron masih menghormati keberadaan dan peran Amerika Serikat.

Pernyataan Presiden Macron yang menyampaikan ia tidak perlu merespon dengan segera komentar yang dilontarkan oleh Presiden Trump, menandakan ia berhati-hati dalam menanggapi. Ia tidak terlalu responsif menilai pernyataan Presiden Trump yang kontroversial dan cenderung menunjukkan lemahnya penghargaan pada sesama Presiden di negara lain. Dengan demikian, Presiden Macron dengan pengalaman di pemerintahan dan memiliki bekal teknokrasi memahami betul hubungan diplomatic yang mesti dibangun antara sesama presiden dari negara-negara yang patut diperhitungkan. Berbanding dengan Presiden Donald Trump, maka Presiden Macron lebih memiliki pelatihan tentang norma dan etika diplomatic yang menjadikan ia berpikir bahwa komentar Presiden Trump bukanlah hal penting untuk segera ditanggapi.

Pernyataan Macron yang menyampaikan bahwa rakyat Perancis pasti tidak mengharapkan presidennya menanggapi cuitan Trump merupakan pertanda Presiden Macron mempertimbangkan persoalan itu sendiri dan mempertimbangkan apa yang

konstituennya anggap lebih penting. Hal ini menjadi sinyal adanya gaya kepemimpinan yang konsultatif yang menjadi bagian dari gaya kepemimpinan konsiliatoris menurut Margareth Hermann (1980).

Presiden Macron juga adalah figur yang menyampaikan pentingnya untuk berbagi tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab untuk menjamin perdamaian global di tengah ketidakpastian saat ini. Dalam peringatan 100 tahun Perang Dunia I, Presiden Macron mengajukan agar negara Uni Eropa memperkuat pertahanan. Pertahanan ini dilakukan dengan membeli produk pertahanan dari negara Uni Eropa sendiri. Belakangannya ia menyebut bahwa perlu untuk mengurangi pembelian pertahanan dan keamanan dari negara yang tidak ikut andil dalam pakta pertahanan NATO, dalam hal ini merujuk pada komitmen Amerika Serikat yang mundur dari kesepakatan NATO (“Merkel joins Macron in calling for EU army to complement NATO – POLITICO,” 2018).

Simpulan

Paparan di atas menjelaskan sedikit dari banyak yang dapat dijelaskan melalui level analisis individu. Level analisis individu membantu menilai kepribadian, motivasi dan keyakinan yang dimiliki oleh presiden suatu negara. Tulisan ini meneliti kepribadian, motivasi dan keyakinan yang dimiliki oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Penjelasan di atas menguatkan bahwa Presiden Macron ialah figur presiden dengan gaya kepemimpinan lebih dekat pada meminjam konsep gaya kepemimpinan milik Jerrold Post, Hermann dan Hudson sebagai konsiliatoris. Ciri-ciri konsiliatoris lebih melekat pada figure Presiden Macron dari peristiwa yang terjadi semenjak Macron dilantik menjadi presiden pada Mei 2017. Ciri-ciri tersebut antara lain Presiden Macron sedikit menunjukkan bukti bahwa ia menantang Batasan-batasan dalam ranah hubungan internasional yang berlaku seperti hubungan diplomatic, kerjasama, kesepakatan yang telah berjalan dan lainnya. Jika dibandingkan dengan Presiden Trump, maka Presiden Macron lebih dekat dengan gaya kepemimpinan yang tidak ambisius dan tidak mengejar dan meluaskan kekuasaan pengaruhnya. Tidak hanya itu, Presiden Macron dapat disimpulkan sebagai pribadi yang banyak mengeluarkan pernyataan yang kontroversial menyikapi kritik yang diarahkan padanya. Ia dalam merespon kritik selalu mempertimbangkan apa yang menurut konstituennya anggap penting. Hal ini disampaikan sesaat ia mendapat kritik dari Presiden Trump melalui cuitan di twitternya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kompleksitas Presiden Macron dalam mengolah informasi yang sampai padanya cukup rendah. Dengan demikian ia tergolong pada figure pemimpin dengan *high complexity*. Terakhir adalah pandangan Presiden Macron atas hubungan dengan banyak mitra senegarannya. Presiden Macron dapat digolongkan sebagai figure yang bertanggung jawab dalam proses. Hal ini ditegaskan melalui komitmennya untuk mengajak negara-negara anggota Uni Eropa untuk menguatkan pertahanan dan keamanannya di tengah-tengah sentiment mundurnya Amerika Serikat dan kerumitan yang diakibatkan oleh peristiwa yang melibatkan Rusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Presiden Macron adalah figure pemimpin dengan gaya kepemimpinan konsiliatoris setelah dikaji menggunakan level analisis individu. Saran untuk penelitian ke depannya adalah menggunakan data peristiwa dan diolah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melibatkan lebih banyak figure presiden negara berpengaruh agar mendapat hasil signifikan korelasi antara kepribadian, motivasi dan keyakinan dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Daftar Pustaka

Dallison, P. (2018, November 15). Macron to Trump: 'I do not do policy or diplomacy by tweets.' Diambil 16 November 2018, dari <https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-to-donald-trump-i-do-not-do-policy-or-diplomacy-by-tweets/>

Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1), 7–46. <https://doi.org/10.2307/2600126>

Hermann, M. G., & Milburn, T. W. (1977). *A Psychological examination of political leaders*. Free Press.

Hudson, V. M. (2013). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. Rowman & Littlefield.

kompas.id. (2017, Mei 8). Emmanuel Macron, Presiden Baru Perancis. Diambil 15 November 2018, dari <https://kompas.id/baca/utama/2017/05/08/emmanuel-macron-presiden-baru-perancis/>

kompas.id. (2018, Juni 12). Pertemuan G7 Berlangsung Runyam. Diambil 15 November 2018, dari <https://kompas.id/baca/internasional/2018/06/12/pertemuan-g7-berlangsung-runyam/>

Macron brushes off Trump attacks: US alliance deserves “respect” | France News | Al Jazeera. (2018). Diambil 16 November 2018, dari <https://www.aljazeera.com/news/2018/11/macron-brushes-trump-attacks-alliance-deserves-respect-181114201107458.html>

Macron's approval ratings slip again in latest opinion poll – POLITICO. (2018). Diambil 16 November 2018, dari <https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-france-approval-ratings-slip-again-in-latest-opinion-poll/>

Merkel joins Macron in calling for EU army to complement NATO – POLITICO. (2018). Diambil 16 November 2018, dari <https://www.politico.eu/article/angela-merkel-emmanuel-macron-eu-army-to-complement-nato/>

Post, J. M. (2010). *The Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton*. University of Michigan Press.

Tetlock, P. E. (2017). *Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? - New Edition*. Princeton University Press.